

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Agastia (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *Maritime Security Cooperation Within the ASEAN Institutional Framework: A Gradual Shift towards Practical Cooperation* mengkaji perubahan karakter kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara. Dengan menggunakan pendekatan institusional, penelitian tersebut menemukan bahwa kerja sama maritim ASEAN sebagian besar masih berbasis dialog, dengan sangat sedikit contoh kerja sama praktis yang terwujud. Tiga forum utama dalam kerangka ASEAN, yakni ASEAN *Regional Forum* (ARF), ASEAN Defence Minister's Meeting (ADMM), dan ASEAN Maritime Forum (AMF), masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan. Salah satu kelemahan utama yang ditemukan adalah perbedaan persepsi antar negara anggota mengenai keamanan maritim, yang mengakibatkan proses akomodasi operasional membutuhkan waktu yang panjang sehingga output yang dihasilkan cenderung hanya berupa dialog dan pertukaran informasi, bukan tindakan yang konkret.

Dalam penelitian Koga (2022) yang berjudul *Managing Great Power Politics: ASEAN, Institutional Strategy, and the South China Sea* juga menjelaskan bahwa ketika kekuatan relatif Amerika Serikat menurun dan pengaruh militer-ekonomi Tiongkok meningkat, strategi institusional negara-negara ASEAN melalui berbagai forum kawasan mulai digagas bersama. Koga menjelaskan bahwa AMM dan KTT ASEAN menjadi area *balancing normative* lewat deklarasi, ARF dan EAS sebagai alat *hedging* dengan melibatkan kekuatan besar, sedangkan dialog ASEAN-Tiongkok dan ADMM/ADMM-Plus fokus pada *co-option* dan pembentukan aturan teknis seperti CUES, dan pedoman interaksi laut. Namun adanya perbedaan peran dan strategi terhadap Laut China Selatan dalam setiap forum membuat efektivitasnya menjadi terbatas.

Dalam penelitian Ayesha dan Askari (2024) yang berjudul *China-ASEAN Approaches towards the South China Sea Disputes*, menganalisis pendekatan ASEAN terhadap sengketa Laut China Selatan serta respon *soft power* Tiongkok dalam rentang waktu 2010-2022. Penelitian ini memandang ASEAN sebagai proyek integrasi kawasan yang penting, namun sejak awal menghadapi kesulitan dalam membangun keamanan kawasan yang kuat akibat kompleksitas proses politik internasional dan perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggotanya. Meskipun deklarasi ASEAN menekankan prinsip pengendalian diri, penolakan penggunaan kekerasan, dan penyelesaian sengketa secara damai, implementasi dan kesatuan sikap ASEAN dalam menghadapi tekanan China tetap lemah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ASEAN memiliki norma dan forum diplomasi, namun efektivitasnya dibatasi oleh ketidakserasian internal dan tekanan eksternal dari China yang terus menggunakan kombinasi pengaruh ekonomi, politik, dan keamanan untuk mempertahankan posisinya di kawasan.

Rizani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul *ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea*, menjelaskan bagaimana *ASEAN Way* membentuk peran ASEAN dalam proses perundingan *Code of Conduct for the South China Sea*, sekaligus mengoreksi pandangan pesimis yang menilai ASEAN gagal karena tidak mampu “menyeimbangkan kekuatan” dengan Tiongkok. ASEAN lebih berfungsi sebagai wadah untuk sosialisasi dan *co-operative security*, bukan sebagai pakta militer mekanisme *hard balancing* terhadap kekuatan besar. Penelitian ini menegaskan bahwa COC tidak realistis untuk dijadikan sebagai solusi final sengketa Laut China Selatan, karena fungsi utama dalam proses COC adalah menyediakan arena normatif yang fleksibel untuk berdialog, konsultasi, dan keterlibatan kekuatan besar yang menjaga perdamaian relative meski sengketa belum terselesaikan secara hukum.

Penelitian Azalie (2025) yang berjudul *Blue Governmentalities and Blue Economy Development: Leveraging Small State Economy with China via RCEP*, mengkaji dimensi ekonomi dari hubungan China dengan negara-negara ASEAN, khususnya melalui studi kasus Brunei Darussalam. Penelitian tersebut menemukan bahwa China telah memiliki tata kelola ekonomi biru yang relatif matang berbasis

inovasi, infrastruktur, dan kolaborasi antar-aktor. Sementara Brunei masih berada dalam fase awal dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas. Meskipun fokus penelitian ini berbeda dari dimensi keamanan, temuan Azalie relevan dengan penelitian ini karena menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap China, salah satunya melalui kerangka RCEP, turut mempengaruhi dinamika diplomasi di Laut China Selatan, khususnya dalam memperlemah kesatuan sikap ASEAN.

Dalam penelitian yang dibuat oleh Mustaza & Saidin (2020) yang berjudul *ASEAN, China, and the South China Sea Territorial Disputes: Analysis of Conflict Management Strategies* (Intellectual Discourse, Vol. 28, No. 2) menganalisis efektivitas mekanisme ASEAN dalam menangani sengketa Laut China Selatan dengan China, menggunakan sumber primer dan sekunder. China menggunakan tiga strategi dalam mengelola klaimnya di Laut China Selatan, yaitu *delaying* (menunda), *escalation* (eskalasi), dan *cooperation* (kerja sama). Dengan pola historis dari Paracels (1959-1974) hingga Spratly (1978-1995, termasuk insiden Johnson Reef 1988 dan Mischief Reef 1994). Pendekatan China konsisten mengacu pada prinsip Deng Xiaoping: “*Sovereignty is ours, set aside disputes, pursue joint development.*” ASEAN sendiri berperan sebagai fasilitator melalui sejumlah instrument seperti, TAC 1976, DOC 2002, ADMM/ADMM-Plus, ARF, dan kerangka COC 2017, yang mana berfungsi sebagai penunjang untuk membangun kepercayaan dan mencegah eskalasi, meskipun belum mengikat secara hukum.

Penelitian yang ditulis oleh Mia, Tao, & Anderson (2024) yang diberi judul *The South China Sea Dispute and Regional Response*, menganalisis sengketa Laut China Selatan sejak tahun 2000 melalui lensa realisme dengan menyoroti kepentingan ekonomi, keamanan nasional, politik domestik ataupun regional, dan faktor historis, dan terfokus pada China dan negara anggota ASEAN. Laut China Selatan dinilai penting secara strategis karena menjadi satu dari tiga jalur perdagangan maritim dunia dengan nilai 5,3 triliun US Dollar pertahunnya, sumber daya perikanan, dan cadangan minyak serta gas yang melimpah. Tindakan China dalam melakukan reklamasi pulau buatan di tujuh terumbu sejak tahun 2013 serta pembangunan fasilitas militer, dilihat sebagai strategi realis untuk mengamankan

dominasi regional. Meskipun ada perdebatan apakah ini bersifat defensif atau ofensif. Respons regional sendiri dikategorikan menjadi diplomasi, yakni negosiasi bilateral ataupun multilateral melalui ASEAN, ARF, kerja sama regional (DOC 2002), serta keterlibatan internasional, dan kerja sama lingkungan atau maritim. Negara kecil atau menengah ASEAN cenderung menggunakan “*soft realism*”, yakni akomodasi terhadap China sambil memanfaatkan forum internasional untuk meningkatkan prestise dan posisi tawar, bukan konfrontasi langsung. ASEAN berfungsi lebih sebagai arena neorealis ketimbang mekanisme fungsional yang efektif menyatukan kepentingan anggotanya.

Amer (2010) dalam penelitiannya yang berjudul *The Disputes Management Approach of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): What Relevance for the South China Sea Situation?* Membahas bahwa ASEAN sebenarnya sudah mengembangkan pendekatan manajemen sengketa berbasis prinsip perdamaian dan mekanisme regional, tetapi efektivitasnya terbatas karena negara anggota belum aktif memanfaatkan instrument yang tersedia. ASEAN juga cenderung tidak melakukan intervensi langsung, melainkan menyediakan norma dan forum dialog. Sehingga kapasitasnya lebih kuat dalam pengelolaan ketegangan daripada penyelesaian final sengketa.

Dalam penelitian Azari et al. (2023) yang diberi judul *Disputes in the South China Sea and the Role of China and ASEAN in Conflict Resolution* menekankan bahwa Laut China Selatan adalah kawasan dengan kepentingan strategis dan ekonomi yang besar, sehingga klaim maritim yang saling tumpang tindih antara China, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Taiwan mudah berkembang menjadi ketegangan politik dan keamanan. Azari et al. juga menyoroti bahwa sikap China yang makin asertif melalui pendudukan pulau, pembangunan militer, dan patrol memperbesar risiko insiden di lapangan.

Sedangkan dalam penelitian Yunanto (2025) yang berjudul *Analysis of the South China Sea: Resource Potential and Future Conflict Risks for ASEAN Countries* melengkapi dua penelitian sebelumnya dengan menunjukkan bahwa konflik di Laut China Selatan tidak hanya bersifat geopolitik tetapi juga didorong oleh potensi sumber daya alam dan jalur perdagangan yang sangat besar. Penelitian

ini menegaskan bahwa perbedaan tafsir UNCLOS, klaim *nine-dash line*, dan militerisasi semakin memperburuk konflik. Sementara, mediasi ASEAN terhambat oleh perbedaan kepentingan internal, pengaruh ekonomi China, dan keterlibatan kekuatan eksternal.

Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Agastia (2021)	<i>Maritime Security Cooperation Within the ASEAN Institutional Framework: A Gradual Shift towards Practical Cooperation</i>	Kerja sama yang dilakukan ASEAN sebagian besar masih berbasis dialog. Dalam dialog tersebut terdapat kelemahan utama, yaitu adanya perbedaan persepsi antar negara anggota yang mengakibatkan proses akomodasi operasional menjadi membutuhkan waktu yang panjang sehingga tidak menghasilkan tindakan yang konkret.
Koga (2022)	<i>Managing Great Power Politics: ASEAN, Institutional Strategy, and the South China Sea</i>	Setiap forum dialog yang dimiliki ASEAN memiliki strategi dan peran yang berbeda terhadap Laut China Selatan. Oleh karena itu, efektivitasnya menjadi terbatas.
Ayesh dan Askari (2024)	<i>China - ASEAN Approaches towards the South China Sea Disputes</i>	ASEAN memiliki norma dan forum diplomasi namun efektivitasnya dibatasi oleh ketidakserasian internal dan tekanan eksternal dari China.
Rizani (2021)	<i>ASEAN Way: Managing Expectation in the Code of Conduct for the South China Sea</i>	ASEAN lebih berfungsi sebagai wadah untuk sosialisasi dan <i>co-operative security</i> . Peneliti menegaskan bahwa COC tidak realistis untuk dijadikan sebagai solusi final sengketa.

Azalie (2025)	<i>Blue Governmentalities and Blue Economy Development: Laveranging Small State Economy with China via RCEP</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi negara-negara ASEAN terhadap China, turut mempengaruhi dinamika diplomasi di Laut China Selatan, khususnya kesatuan sikap ASEAN.
Mustaza & Saidin (2020)	<i>ASEAN, China, and the South China Sea Territorial Disputes: Analysis of Conflict Management Strategies</i>	China menggunakan strategi dalam mengelola klaimnya di Laut China Selatan. Dan forum ASEAN sendiri berfungsi sebagai penunjang untuk membangun kepercayaan dan mencegah eskalasi
Mia, Tao, dan Anderson (2024)	<i>The South China Sea Dispute and Regional Response</i>	Laut China Selatan dinilai penting karena strategis dan nilai ekonominya yang tinggi. Tindakan China dalam melakukan reklamasi dan pembangunan fasilitas militer, dilihat sebagai strategi realis untuk mengamankan dominasi regional meskipun menimbulkan perdebatan. Respons regional sendiri dikategorikan sebagai diplomasi, yakni negosiasi bilateral dan multilateral. Negara anggota ASEAN juga cenderung menggunakan “ <i>soft realism</i> ” dengan memanfaatkan

		forum internasional untuk meningkatkan prestise dan posisi tawar, bukan konfrontasi langsung.
Amer (2010)	<i>The Disputes Management Approach of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): What Relevance for the South China Sea Situation?</i>	ASEAN sebenarnya sudah mengembangkan pendekatan manajemen sengketa berbasis prinsip perdamaian dan mekanisme regional namun efektivitasnya terbatas. ASEAN juga cenderung tidak melakukan intervensi secara langsung tetapi dengan menyediakan norma dan forum dialog.
Azari, Chandran, Aziz (2023)	<i>Disputes in the South China Sea and the Role of China and ASEAN in Conflict Resolution</i>	Laut China Selatan adalah kawasan dengan kepentingan strategis dan ekonomi yang besar, sehingga klaim tumpang tindih yang dilakukan China dan melibatkan negara anggota ASEAN mudah berkembang menjadi ketegangan politik dan keamanan. Sikap China yang semakin asertif dapat memperbesar risiko insiden di kawasan tersebut.
Yunanto (2025)	<i>Analysis of the South China Sea: Resource Potential and Future</i>	Konflik di Laut China Selatan tidak hanya bersifat geopolitik namun juga dorong oleh potensi sumber daya alam dan jalur

	<i>Conflict Risks for ASEAN Countries</i>	perdagangan yang besar. Perbedaan pendapat mengenai UNCLOS, klaim <i>nine-dash line</i>, dan militerisasi semakin memperburuk konflik. Sementara mediasi ASEAN terhambat oleh perbedaan kepentingan internal setiap negara anggota, pengaruh ekonomi China, dan adanya keterlibatan kekuatan eksternal.
--	--	--